

Kapasitas Fiskal Dan Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah: Analisis Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2025

Nafiah Hekshala Purwanto^{1*}, Karina Putri Wahyudin², Hellen Qurotul Nurassifa³, Andi Farera⁴, Anggi Ayu Wulandari⁵, Salma Shadiyah⁶

^{1,2,3,4,5,6}S1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: ¹24040674134@mhs.unesa.ac.id, ²24040674147@mhs.unesa.ac.id, ³24040674137@mhs.unesa.ac.id,
⁴24040674149@mhs.unesa.ac.id, ⁵24040674150@mhs.unesa.ac.id, ⁶24040674167@mhs.unesa.ac.id,

Email Penulis Korespondensi: ¹24040674134@mhs.unesa.ac.id

Abstrak—Penelitian ini menganalisis kapasitas fiskal dan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tahun 2025 dalam kerangka desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap data APBD, BPS, dan publikasi terkait. Hasil menunjukkan pendapatan daerah masih didominasi transfer pusat sebesar 70,1%, sementara kontribusi PAD hanya 29,9% dengan nilai per kapita relatif rendah. Kondisi tersebut menimbulkan defisit anggaran dan mencerminkan kemandirian fiskal terbatas. Faktor utama meliputi basis pajak sempit, sektor informal, dan optimalisasi pemungutan yang belum maksimal, khususnya pada sektor pariwisata serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah.

Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, PAD, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Daerah, Kota Batu

Abstract—This study analyzes the fiscal capacity and limitations of Local Own-Source Revenue (PAD) in Batu City in 2025 within the framework of fiscal decentralization. The method used is descriptive qualitative through literature review of APBD data, BPS, and related publications. The results show that regional revenue is still dominated by central government transfers at 70.1%, while PAD contributes only 29.9% with relatively low per capita value. This condition leads to a budget deficit and reflects limited fiscal independence. Key factors include a narrow tax base, informal sector dominance, and suboptimal revenue collection, particularly in the tourism sector and improving taxpayer compliance.

Keywords: Fiscal Capacity, Local Revenue, Fiscal Decentralization, Regional Independence, Batu City

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam kerangka ini, konsep *fiscal autonomy* menekankan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya sering muncul fenomena *horizontal fiscal imbalance*, yaitu ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah yang disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi, basis pajak, serta struktur perekonomian masing-masing wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam menghasilkan PAD untuk mendukung pembangunan. Secara teoretis, gagasan ini sejalan dengan *Decentralization Theorem* yang dikemukakan oleh [1], yang menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah menyediakan barang dan layanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat lokal, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kapasitas fiskal dan keterbatasan PAD menjadi penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan publik dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Secara empiris, Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota besar berbasis industri. Struktur perekonomian Kota Batu lebih banyak bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian hortikultura, serta sektor jasa yang mendukung aktivitas wisata. Berbagai destinasi wisata alam, taman rekreasi, serta kegiatan agrowisata menjadikan Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata utama di Jawa Timur. Karakteristik tersebut membentuk basis ekonomi daerah yang relatif spesifik, di mana aktivitas ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan layanan pendukungnya seperti perhotelan, restoran, dan perdagangan. Meskipun sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, struktur ekonomi yang cukup terkonsentrasi pada sektor tertentu juga berpotensi membatasi variasi sumber pendapatan daerah. Kondisi ini menjadikan Kota Batu menarik untuk dikaji dalam konteks kapasitas fiskal daerah, terutama dalam melihat sejauh mana karakteristik ekonomi tersebut mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian mengenai kapasitas fiskal daerah di Indonesia umumnya menekankan pada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat [2]. Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa optimalisasi PAD dapat menjadi strategi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah [3]. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar kontribusi PAD, maka semakin kuat pula kapasitas fiskal suatu daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengukuran kemandirian fiskal secara umum atau menggunakan objek penelitian yang luas, seperti antar daerah dalam periode tertentu. Pendekatan tersebut cenderung menghasilkan gambaran yang bersifat agregatif sehingga belum mampu menjelaskan secara lebih mendalam kondisi keterbatasan fiskal pada satu daerah tertentu. Penelitian sebelumnya cenderung menjelaskan rendahnya PAD dari sisi keterbatasan potensi ekonomi, basis pajak, dan optimalisasi pemungutan. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan fenomena di Kota Batu, di mana aktivitas ekonomi pariwisata berkembang pesat tetapi tidak diikuti peningkatan PAD yang proporsional. Penelitian ini menawarkan sudut pandang berbeda dengan melihat adanya ketidaksesuaian antara karakter ekonomi pariwisata yang bersifat tersebar, semi-informal, dan berbasis kunjungan dengan desain sistem fiskal daerah yang masih berorientasi pada ekonomi formal dan terpusat. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji keterbatasan PAD dalam memengaruhi kapasitas fiskal daerah masih relatif terbatas [4]. Padahal, keterbatasan PAD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur ekonomi daerah, potensi sumber pendapatan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. engan desain sistem fiskal daerah yang masih berorientasi pada ekonomi formal dan terpusat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai kapasitas fiskal tidak hanya perlu mengukur tingkat kemandirian fiskal, tetapi juga harus mampu menjelaskan faktor penyebab keterbatasan PAD secara lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian mengenai kapasitas fiskal di Kota Batu menjadi relevan karena daerah ini memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan kota lain, terutama dengan basis ekonomi pariwisata yang dapat memengaruhi struktur pendapatan daerah. Penelitian ini kemudian menawarkan kebaruan dengan fokus pada analisis kapasitas fiskal dan keterbatasan PAD pada satu daerah secara spesifik dengan menggunakan data terbaru tahun 2025. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi riil keuangan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada kajian literatur untuk menganalisis fenomena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu, Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberi gambaran komprehensif melalui literatur yang relevan. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti dalam menelaah dan membandingkan temuan peneliti terdahulu.

Penelitian ini memiliki tiga tahapan, yaitu tahapan pencarian data, seleksi data, dan analisis data. Pada tahap pencarian data, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Tahun 2025. Pada penelitian ini, digunakan sumber penelitian berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kota Batu Tahun 2025, data Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2025, dokumen peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah Kota Batu, serta jurnal ilmiah yang membahas desentralisasi fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi pada karya seseorang tentang sesuatu untuk ditelaah lebih dalam. Kedua, pada tahap seleksi data, dilakukan penyaringan data untuk menentukan kredibilitas temuan. Seleksi data meliputi relevansi serta aktualitas data [5].

Ketiga, tahap analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi data berdasarkan rumusan masalah penelitian. Data yang diseleksi berkaitan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pada tahap penyajian data, data yang telah diseleksi disajikan kedalam bentuk deskriptif, tabel maupun gambar.

Penyajian data mempermudah peneliti dalam memberi gambaran lebih jelas hubungan antar variabel yang memengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Pada tahap ini peneliti dapat menentukan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Batu. Diharapkan dengan menggunakan teknik

analisis Miles dan Huberman dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penelitian

Sumber	Variabel	Data yang Diperoleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun 2025 [5]	Pendapatan Daerah	Rp1.095.962.693.879,0
	Belanja Daerah	Rp1.240.093.370.064,50
	Pembiayaan Daerah	Rp144.130.676.185,50
	Pendapatan Asli Daerah	Rp327.985.129.879,00
	Pendapatan transfer	Rp767.977.564.000,00
Badan Pusat Statistik Kota Batu (2025) [6]	Luas Wilayah	194,17 km2
	Jumlah Penduduk	Pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 225.408 jiwa. Tahun 2024, Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,62% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif mencapai 159.250 jiwa atau sekitar 70,65% dari total penduduk.
	Ketenagakerjaan	Tahun 2024 Kota Batu memiliki jumlah Angkatan kerja sebesar 128.4770 orang dengan 3,63% pengangguran. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Kota Batu sebesar 73,53%. Lapangan pekerjaan utama di Kota Batu berada di sektor jasa dengan penduduk bekerja sekitar 64,64%. Sebagian jasa tersebut terhubung dengan aktivitas pariwisata. Di luar sektor jasa, sekitar 18,84% penduduk bekerja di sektor primer (pertanian, pertambangan, penggalian) serta 16,88% bekerja di sektor sekunder (manufaktur dan industri pengolahan).
	Pembangunan manusia	Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu mencapai 79,69, menempatkan Kota Batu dalam kategori “tinggi” untuk status Pembangunan manusia. IPM Kota Batu (2024) diukur berdasarkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar kelayakan hidup. Dari tiga indikator tersebut diperoleh hasil sebesar 75,36 (umur harapan hidup saat lahir), 9,87 (rata-rata lama sekolah), 14,253 (pengeluaran per kapita), serta 14,58 (harapan lama sekolah).
	Pendapatan regional	a. PDRB Atas Dasar Harga yang Berlaku: Rp22.154,31 miliar b. Pertumbuhan ekonomi: 5,04% c. Laju Inflasi Implisit PDRB:

- 2,76%
- d. Kategori penyumbang PDRB terbesar tahun 2024 meliputi: perdagangan besar dan eceran serta resparasi mobil (18,77%), jasa lainnya seperti aktivitas pariwisata dan rekreasi (16,02%), serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,50%). Kemudian, kategori dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2024 meliputi: transportasi dan pergudangan (12,33%), industri pengolahan (8,60%) serta *real estate* (6,69%)
-



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Kapasitas Fiskal dan Struktur Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2025

Rendahnya PAD Kota Batu tidak dapat dijelaskan hanya melalui argumen klasik seperti basis pajak sempit atau lemahnya pemungutan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya *fiscal mismatch* antara karakter ekonomi pariwisata Kota Batu dengan sistem pemungutan pajak daerah. Jika pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, maka menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang relatif terbatas [6]. Dalam konteks Kota Batu, kapasitas fiskal ditelaah dengan menempatkan struktur APBD Tahun Anggaran 2025 dan kondisi sosial ekonomi daerah sebagai alat uji untuk melihat apakah aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah ini benar-benar tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah menghimpun penerimaan fiskal.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2025

Struktur APBD dibaca sebagai cermin kekuatan fiskal daerah dalam membiayai dirinya sendiri. Rasio antara pendapatan dan belanja menunjukkan apakah pemerintah daerah berdiri di atas kapasitas pendapatannya atau bergantung pada mekanisme pembiayaan.

Tabel 2. Struktur APBD Kota Batu Tahun 2025

Komponen	Nilai
Pendapatan Daerah	Rp1.095.962.693.879
Belanja Daerah	Rp1.240.093.370.064,50
Pembiayaan Daerah	Rp144.130.676.185,50

Sumber: [6]

Data pada tabel menunjukkan belanja daerah melampaui pendapatan sebesar Rp144,13 miliar. Selisih ini menandakan bahwa ritme belanja pembangunan tidak ditopang oleh kekuatan pendapatan daerah sendiri. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pembangunan dengan fondasi fiskal yang rapuh, karena sumber pendapatan tidak mampu menjadi penyangga utama kebutuhan belanja. Pembiayaan hadir bukan sebagai instrumen pelengkap, tetapi sebagai penopang utama agar APBD tetap berjalan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal Kota Batu berada pada posisi reaktif terhadap keterbatasan pendapatan, bukan pada posisi mengendalikan arah belanja melalui kekuatan penerimaan daerah.

Struktur Sumber Pendapatan Daerah

Komposisi pendapatan daerah pada dasarnya memperlihatkan sumber kekuatan fiskal suatu daerah. Perbandingan antara PAD dan pendapatan transfer menunjukkan apakah pemerintah daerah benar-benar hidup dari aktivitas ekonomi wilayahnya sendiri atau dari aliran dana yang berasal dari luar.

Tabel 2. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2025

Sumber Pendapatan	Nilai	Persentase
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp327.985.129.879	29,9%
Pendapatan Transfer	Rp767.977.564.000	70,1%
Total Pendapatan Daerah	Rp1.095.962.693.879	100%

Sumber: Diadaptasi dari [7], [8]

Tabel tersebut menunjukkan bahwa fondasi pendapatan Kota Batu tidak dibentuk oleh kemampuan mengekstraksi nilai ekonomi lokal, tetapi oleh transfer pusat yang mencapai 70,1%. PAD yang hanya 29,9% menandakan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kota Batu belum menjelma menjadi kekuatan fiskal daerah. Struktur ini memperlihatkan ketergantungan yang bersifat struktural, di mana APBD lebih ditopang oleh alokasi eksternal dibanding hasil penghimpunan ekonomi dari wilayahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah per Kapita

PAD per kapita digunakan untuk melihat seberapa besar nilai ekonomi masyarakat yang benar-benar berhasil ditarik masuk ke kas daerah. Ukuran ini menunjukkan intensitas ekstraksi fiskal pemerintah daerah terhadap aktivitas ekonomi penduduknya.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah per Kapita Kota Batu

Variabel	Nilai
PAD Kota Batu	Rp327.985.129.879
Jumlah Penduduk	225.408 jiwa
PAD per Kapita	± Rp1.455.000 per orang per tahun

Sumber: Diadaptasi dari [5], [7]

Nilai PAD per kapita sebesar ±Rp1,45 juta per orang per tahun menunjukkan bahwa perputaran ekonomi masyarakat Kota Batu hanya menghasilkan kontribusi fiskal yang sangat kecil bagi daerah. Angka ini memperlihatkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menangkap nilai ekonomi yang sebenarnya terjadi di tingkat masyarakat. Aktivitas ekonomi tumbuh, namun jejak fiskalnya yang masuk ke kas daerah sangat tipis. Kondisi ini menegaskan lemahnya kapasitas ekstraksi fiskal dibandingkan dengan dinamika ekonomi yang berlangsung.

Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi Kota Batu

Kondisi sosial ekonomi menjadi pembanding penting untuk menguji apakah keterbatasan PAD disebabkan oleh lemahnya kapasitas masyarakat atau oleh lemahnya kemampuan fiskal daerah dalam menangkap aktivitas ekonomi yang ada.

Tabel 4. Indikator Sosial Ekonomi Kota Batu

Indikator	Nilai
Luas Wilayah	194,17 km ²
Jumlah Penduduk	225.408 jiwa
Penduduk Usia Produktif	70,65%
Tingkat Pengangguran	3,63%
Indeks Pembangunan Manusia	79,69

Indikator pada tabel menunjukkan Kota Batu memiliki basis demografi produktif, tingkat pengangguran rendah, dan kualitas pembangunan manusia yang tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa keterbatasan PAD tidak dapat dikaitkan dengan lemahnya kapasitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi memiliki prasyarat sosial yang kuat untuk tumbuh. Rendahnya kontribusi fiskal justru menunjukkan bahwa sistem penerimaan daerah tidak mampu menangkap potensi ekonomi yang ditopang oleh kondisi sosial yang relatif maju.

Struktur Perekonomian Daerah

Struktur PDRB Kota Batu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah ditopang oleh perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian. Komposisi ini memperlihatkan bahwa perputaran ekonomi tidak berada pada sektor yang sulit dipajaki, tetapi justru pada sektor-sektor yang secara teoritis paling mudah dikonversi menjadi pajak daerah dan retribusi.

Tabel 5. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kota Batu Tahun 2024

Sektor Ekonomi	Kontribusi
Perdagangan besar dan eceran	18,77%
Jasa lainnya (termasuk pariwisata)	16,02%
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	14,50%

Dominasi sektor perdagangan dan jasa menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Batu berlangsung pada sektor yang memiliki objek pajak jelas, frekuensi transaksi tinggi, serta keterkaitan langsung dengan konsumsi wisatawan. Ditambah lagi, pertumbuhan tertinggi justru terjadi pada sektor transportasi, industri pengolahan, dan *real estate*, yang semuanya memiliki potensi penerimaan fiskal signifikan. Struktur ini memperlihatkan fakta yang kontras. Basis ekonomi Kota Batu berada pada sektor-sektor yang paling potensial menghasilkan PAD, namun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tetap rendah. Artinya, persoalan PAD di Kota Batu tidak dapat dijelaskan oleh lemahnya potensi ekonomi, tetapi oleh ketidakmampuan sistem fiskal daerah dalam menangkap perputaran ekonomi yang nyata terjadi.

Ketika sektor perdagangan, jasa, pariwisata, transportasi, dan properti tumbuh, tetapi jejaknya tidak terlihat kuat dalam struktur PAD, kondisi ini menunjukkan adanya celah serius antara dinamika ekonomi dan kemampuan ekstraksi fiskal daerah. Ekonomi bergerak cepat, sistem penerimaan daerah berjalan lambat. Temuan ini memperjelas posisi kapasitas fiskal Kota Batu. Pendapatan daerah mencapai Rp1,09 triliun, namun tetap tidak mampu mengimbangi belanja. PAD hanya 29,9% dan PAD per kapita sangat rendah untuk daerah dengan struktur ekonomi seperti ini. Kondisi tersebut menegaskan bahwa potensi ekonomi bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah aktivitas ekonomi yang berkembang tidak terbaca dan tidak terkonversi secara efektif ke dalam penerimaan fiskal daerah

3.2 Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Pada dasarnya desentralisasi fiskal dirancang agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangannya melalui peningkatan PAD [9]. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering digunakan sebagai salah satu cara untuk melihat seberapa mandiri kondisi keuangan dari suatu daerah, terutama sejak diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia. Ketika kontribusi PAD terhadap total pendapatan total daerah cukup besar, maka akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sebagian kebutuhan pembangunan daerah potensi ekonomi yang ada di wilayahnya sendiri. Sumber tersebut dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Sebaliknya, jika kontribusi PAD masih rendah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Di situasi seperti ini, menandakan pemerintah daerah cenderung lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

Kondisi tersebut juga tercermin pada struktur pendapatan di Kota Batu, di mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil. Data menunjukkan bahwa PAD Kota Batu hanya menyumbang sekitar

29,9% dari total pendapatan daerah, sementara sisanya di dominasi oleh dana transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya *tax effort* yang masih rendah, sehingga kemampuan daerah dalam menggali pendapatan lokal masih belum optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat juga menunjukkan adanya *fiscal dependency*, dimana kapasitas fiskal daerah tidak mampu berdiri secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwasanya *fiscal extraction capacity* belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam menangkap potensi ekonomi lokal.

Keterbatasan penerimaan PAD pada dasarnya tidak dapat lepas dari bagaimana struktur ekonomi dari suatu daerah itu terbentuk dan berkembang. Apabila aktivitas ekonomi wilayah tersebut masih terbatas, maka peluang pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dari sumber-sumber lokal juga ikut terbatas. Namun dalam konteks Kota Batu, persoalannya tidak semata pada keterbatasan ekonomi, melainkan adanya *fiscal mismatch* antara struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor pariwisata dengan desain pajak daerah yang belum mampu mengakomodasi karakteristik tersebut. Aktivitas ekonomi lokal tumbuh pada sektor jasa, kunjungan wisata, usaha semi-informal yang memungkinkan tidak terbaca sebagai *local tax base* dalam sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada kebijakan pemungutan pajak, tetapi juga pada sistem dalam mengenali dan mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin berkembang kegiatan ekonomi suatu wilayah, maka peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD juga akan semakin besar [10]. Namun kondisi tidak akan terjadi apabila belum didukung oleh sistem pengelolaan yang mendukung. Maka dari itu upaya dalam peningkatan PAD seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administrasi atau hanya sekedar menarik pajak semata, melainkan juga perlu diiringi dengan dorongan terhadap pelaku ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha kecil, peningkatan investasi, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Namun kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan teori yang ada, meskipun aktivitas ekonomi memengaruhi peningkatan PAD, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan daerah yang signifikan di beberapa daerah, termasuk Kota Batu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara potensi ekonomi yang tersedia dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan.

Melihat situasi ekonomi Kota Batu, terlihat paradoks bahwa meskipun memiliki potensi pariwisata yang besar, penerimaan masyarakat belum sepenuhnya memenuhinya. Di mana peningkatan jumlah wisatawan dan perputaran uang yang signifikan tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional, fenomena ini disebut sebagai *uncaptured tourism economy*. Jumlah uang yang diterima dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan wisata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang meningkat. Hal ini menunjukkan paradoks fiskal, dimana pertumbuhan sektoral meningkat, tetapi kapasitas fiskal daerah sering stagnan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pajak hotel, restoran, serta berbagai aktivitas lain yang muncul dari kunjungan wisatawan [11]. Namun, realita yang terjadi di Kota Batu praktiknya tidak seideal itu. Kontribusi dari sektor wisata terhadap PAD sering kali belum cukup optimal. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah masih banyak aktivitas ekonomi yang bersifat informal atau tidak tercatat sebagai objek pajak daerah. Akibatnya potensi ekonomi yang seharusnya cukup besar di sektor pariwisata tidak dapat dikonversikan menjadi PAD bagi pemerintah daerah.

Kondisi serupa seperti yang terjadi di Kota Batu dapat menunjukkan bahwasanya meskipun sektor pajak daerah, terutama pajak hotel restoran memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pada kenyataannya masih terdapat banyak sekali kendala yang menyebabkan penerimaan tersebut belum dilakukan secara optimal [12]. Salah satu yang menjadi penyebab utamanya adalah dominasi aktivitas informal yang mempersempit basis pajak secara struktural. Usaha informal seperti homestay rumahan, pedagang wisata, jasa transportasi lokal, serta pelaku ekonomi mikro masih banyak yang berada di luar registrasi fiskal, sehingga proses *tax extensification* sudah terhambat sejak tahap awal. Selain itu, terdapat kelemahan pada aspek *administrative blind spot*, pendataan wajib pajak masih belum komprehensif, integrasi data transaksi belum tersedia, serta pengawasan berbasis digital belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah kehilangan visibilitas terhadap aktivitas ekonomi yang sebenarnya cukup besar. Sehingga berakibat potensi ekonomi yang ada tidak dapat dikonversikan secara maksimal sebagai PAD meskipun aktivitas ekonomi terutama dari sektor pariwisata terus meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang besar dan kelemahan kelembagaan serta tata kelola yang belum efektif menjadi penyebab PAD yang rendah. Artinya peningkatan aktivitas ekonomi tanpa diikuti oleh sistem pengelolaan yang efektif tidak akan berdampak signifikan pada PAD.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi yang ada di Kota Batu. Upaya tersebut tidak hanya melihat dari sisi besarnya potensi ekonomi yang ada, melainkan pada perbaikan sistem pengelolaan fiskal daerah. Dalam praktiknya, masih terdapat fenomena *revenue leakage by design*, di mana kebocoran penerimaan terjadi bukan hanya karena rendahnya kepatuhan wajib pajak, tetapi juga karena sistem yang belum mampu menangkap transaksi ekonomi secara *real time*. Selain itu, tingkat *tax compliance culture* pada sektor pariwisata dan UMKM juga masih relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara strategi fiskal daerah dan kebijakan pengembangan pariwisata. Akibatnya, pertumbuhan

ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dapat diubah menjadi PAD yang lebih baik. Optimalisasi penerimaan daerah memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi untuk pendataan, pengawasan, dan digitalisasi pajak daerah [13]. Oleh karena itu, masalah utama bukanlah potensi ekonomi, tetapi kurangnya kemampuan kelembagaan fiskal untuk mengidentifikasi, mencatat, mengawasi, dan memungut nilai ekonomi lokal secara efektif. Langkah-langkah ini sangatlah penting karena terdapat kemungkinan masih ada potensi penerimaan yang sebenarnya cukup besar tetapi belum tergali secara maksimal akibat dari keterbatasan dalam sistem pengelolaan penerimaan daerah yang ada. Aspek kepatuhan pajak juga wajib untuk ditingkatkan mengingat kesadaran juga partisipasi dari pelaku usaha sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan begitu pengelolaan penerimaan dapat terintegrasi dengan dan berbasis sistem, potensi ekonomi dapat lebih berkembang terutama pada sektor pariwisata, sehingga diharapkan dapat lebih optimal dikonversikan sebagai penerimaan daerah.

4. KESIMPULAN

Kapasitas fiskal Kota Batu menunjukkan persoalan yang tidak bersumber pada lemahnya potensi ekonomi, melainkan pada *fiscal mismatch* antara karakter ekonomi pariwisata dengan desain sistem fiskal daerah. Struktur pendapatan didominasi transfer pusat sebesar 70,1%. PAD hanya 29,9%. APBD tidak dibangun dari kemampuan mengekstraksi nilai ekonomi lokal. APBD bertumpu pada alokasi eksternal. PAD per kapita sangat rendah. Jejak fiskal dari aktivitas ekonomi masyarakat sangat tipis. Defisit anggaran Rp144,13 miliar memperlihatkan belanja pembangunan bergerak tanpa ditopang kekuatan pendapatan sendiri. Pembiayaan daerah menjadi penyangga utama agar APBD tetap berjalan. Kapasitas fiskal berada pada posisi reaktif. Pemerintah daerah menyesuaikan belanja terhadap keterbatasan pendapatan.

Struktur ekonomi didominasi perdagangan, jasa, pariwisata, transportasi, properti. Sektor dengan basis pajak kuat. Realitas menunjukkan aktivitas ekonomi tersebut hadir sebagai *invisible local economy* dan *uncaptured tourism economy*. Perputaran uang yang tinggi, transaksi masif, serta kunjungan wisata besar sehingga sistem pajak daerah tidak mampu membacanya. Kondisi ini menunjukkan *administrative blind spot* dalam tata kelola fiskal. Sistem penerimaan hanya efektif menjangkau usaha formal terdaftar. Pertumbuhan ekonomi pariwisata bergerak dalam pola semi-informal, tersebar, berbasis kunjungan. Terjadi *revenue leakage by design*. Kebocoran penerimaan muncul dari desain sistem fiskal yang tidak disiapkan untuk membaca bentuk ekonomi seperti ini. Temuan ini menuntut redesain pendekatan fiskal daerah berbasis karakter ekonomi pariwisata lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Desentralisasi Fiskal yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam segi konseptual maupun metodologi, dimana bimbingan tersebut sangat berarti bagi penulis. Semoga artikel ini dapat memberi wawasan luas bagi para pembaca dan memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu desentralisasi fiskal. Selain itu, penulis berharap artikel ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

REFERENCES

- [1] Hadi, K. Sugiarto, Rorong, and KEUANGAN, *DAERAH*, vol. 24, no. 4, pp. 320–443, 2023, doi: 10.35794/jpekd.46141.24.4.2023.
- [2] N. Hanifah and dkk, 'Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah', *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2024, [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/35741>
- [3] M. Marhamah and I. Harsono, 'Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol. 6, no. 3, pp. 349–360, 2025, doi: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.699.
- [4] P. K. Batu, 'Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Nomor 03 Tahun 2025', *Perwali Kota Batu*, no. 3, 2025.
- [5] B. P. S. K. Batu, *Statistik daerah Kota Batu 2025. Statistik Daerah Kota Batu 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2025.
- [6] Mardiasmo and A. P. K. Batu, 'Otonomi dan manajemen keuangan daerah'. 2018. [Online]. Available: <https://jdih.batukota.go.id>

- [7] D. J. P. Keuangan and K. K. R. Indonesia, 'Data keuangan daerah tahun 2025'. 2025. [Online]. Available: <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- [8] B. P. S. K. Batu, *Kota Batu dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik, 2025. [Online]. Available: <https://batukota.bps.go.id>
- [9] I. Kurniawan, 'Ketergantungan transfer dan kemunduran otonomi fiskal daerah: Sebuah analisis struktural', *BALANCE Journal of Finance, Accounting and Taxation*, vol. 1, no. 2, 2025, doi: 10.64779/xn46t328.
- [10] R. Triada and R. Damayanti, 'Analisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang', *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, 2021, doi: 10.14710/jiip.v6i1.9350.
- [11] Y. S. Adiarti and R. S. Wijaya, 'Analisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batu', *Jambura Economic Education Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 494–508, 2024, doi: 10.37479/jeej.v6i2.24975.
- [12] R. Almerifki and Iskandar, 'Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 22, no. 4, pp. 514–525, 2025, doi: 10.30872/jkin.v21i4.15532.
- [13] H. Fauzan and K. Anshari, 'Studi Literatur: Peran Pembelajaran Matematika Dalam Pembentukan Karakter Siswa', *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, vol. 3, no. 1, pp. 163-175, Mar. 2024, doi: 10.55606/jurripen.v3i1.2802.